



ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dwi Alfallah Shaladin Hernandi^{1*}, Dwi Risma Deviyanti², Wulan Iyhyig Ratna Sari³

¹²³ Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

³Email: wulan.sari@feb.unmul.ac.id

Article History

Received 2022-05-01

Accepted: 2022-06-30

DOI:

[//doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582](https://doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582)

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2015 sampai 2018. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dengan menggunakan analisis varian pendapatan, analisis varian pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk rata-rata pendapatan 100,86%, pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan 5,89%, efektivitas PAD dengan rata-rata 105,78%, varian belanja dengan rata-rata belanja 90,97%, pertumbuhan belanja dengan rata-rata 0,16%, dan efisiensi belanja dengan rata-rata efisiensi 90,97%. Jadi realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018 adalah sudah baik.

Kata kunci: analisis varian, laporan realisasi anggaran, pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi belanja.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the realization of the income and expenditure budget of the Province of East Kalimantan in 2015 until 2018. Realization of the estimated income and expenditure of areas that have increased or decreased can be viewed using the Revenue variant analysis, the analysis of the revenue growth variant, the ratio of the original revenue effectiveness of the region, shopping variants Shopping growth analysis, and spending efficiency ratios. Based on the results of the study showed that the provincial government of East Kalimantan province for an average income of 100.86%, growth in revenue with growth average 5.89%, the effectiveness of PAD with an average of 105.78%, shopping variant with Average shopping is 90.97%, spending growth with an average of 0.16%, and spending efficiency with an average efficiency of 90.97%. So the realization of APBD province East Kalimantan year 2015-2018 is already good.

Keywords: variant analysis, budget realization report, revenue growth, local revenue effectiveness ratio, spending efficiency.

A. PENDAHULUAN

Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan Pemerintahan Daerah dalam membangun daerahnya. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar atau pihak ketiga, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah Daerah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah pada pengeluaran keuangan daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur maka harus menyusun dan menyiapkan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disusun secara umum. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku atau disebut juga SAP. Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka diberikan otonomi atau kewenangan kepada instansi untuk mengurus keuangannya sendiri sehingga pemerintah melaksanakannya fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik. Pemerintah yang baik seharusnya mempublikasikan setiap laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun untuk dapat melihat apakah Laporan Keuangan tersebut Efisiensi dari Provinsi Kalimantan Timur, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta sebagai penilaian kinerja.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus, atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIPKA). Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pentingnya penyandingan antara anggaran dengan realisasinya untuk menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Kalimantan Timur maka hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis belanja. Untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Kalimantan Timur secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat menilai efektifitas dan efisiensi dari pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil dari analisis tersebut terdapat beberapa analisis yang digunakan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu : Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Varian Belanja, Pertumbuhan Belanja Daerah, Efisiensi Belanja. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur".

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan atau penurunan dilihat dari tingkat analisis varian (selisih) anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, varian belanja, pertumbuhan belanja daerah, efisiensi belanja pada Provinsi Kalimantan Timur.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina (2015:19), laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Erlina dkk, 2015: 20). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Paragraf 26 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan memuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 menyatakan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas Pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 dijelaskan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas pada tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

1. Pendapatan: LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja: Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Daerah.
3. Pembiayaan: Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Analisis Pendapatan

Menurut Mahmudi (2010) dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan dituntut untuk memiliki kenandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti pemerintahan daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana transfer.

1. Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan
Analisis varian pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi

pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010:137).

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2010).
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Menurut Mahmudi (2011) Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Menurut Halim (2012) kemampuan daerah dalam menjalankan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%. Namun apabila semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Analisis Belanja

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 37 Tahun 2014). Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara seekonomis, efisien dan efektif.

1. Analisis Varian Belanja Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010).
2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).
3. Analisis Efisiensi Belanja Mahmudi (2010:152) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi

ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

C. METODE

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji kebenarannya dengan suatu alat tertentu yang dapat dinilai orang lain.

Rincian Data Yang Diperlukan

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa data-data tertulis mengenai laporan keuangan tahun 2015-2018.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Dokumentasi (*documentation*)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistik deskriptif, statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi.

Adapun metode analisis untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Varian Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

1. Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan

$$\text{Analisis Varian Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t}{\text{Anggaran Pendapatan } t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } (t) = \frac{\text{Pendapatan tahun } (t) - \text{Pendapatan tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi (2015)

Menurut Halim (2012) kemampuan daerah dalam menjalankan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%. Namun apabila semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

4. Analisis Varian Belanja

$$\text{Analisis Varian Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t)}{\text{Anggaran Belanja Tahun } (t)} \times 100\%$$

5. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } (t) = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t) - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100$$

6. Analisis Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Belanja Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisiensi	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber : Mahmudi (2015)

Menurut Halim (2012) Nilai efisiensi yang diperoleh dari perbandingan tersebut diatas, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur

Visi: "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Misi:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Analisis Varian Pendapatan

Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu pemerintah dalam merealisasikan pendapatan, tanpa melebihi jumlah yang dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah :

Tabel 4.1 Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 - 2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Presentase (%)
2015	Rp. 10.497.631.453.406,00	Rp. 9.464.926.705.876,01	(Rp. 1.032.704.747.529,98)	90,16
2016	Rp. 7.762.674.455.112,16	Rp. 7.985.727.918.251,11	Rp. 223.053.463.138,95	102,87
2017	Rp. 8.223.730.774.720,45	Rp. 8.158.103.650.157,47	(Rp. 65.627.124.563,02)	99,20
2018	Rp. 9.591.235.184.518,12	Rp. 10.669.542.801.846,20	Rp. 1.078.307.617.328,08	111,22
Rata-Rata Varian Pendapatan				100,86

Sumber : PPID KALTIM (diolah : 2019)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebesar (Rp. 1.032.704.747.529,98) atau 90,16%, tahun 2016 sebesar Rp. 223.053.463.138,95 atau 102,87%, tahun 2017 sebesar (Rp. 65.627.124.563,02) atau 99,20%, kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.078.307.617.328,08 atau 111,22%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan :

Tabel 4.2 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pertumbuhan (%)
-------	-------------------------	-----------------

	(Rp)	
2015	Rp. 9.464.926.705.876,01	
2016	Rp. 7.985.727.918.251,11	(15,62)
2017	Rp. 8.158.103.650.157,47	2,15
2018	Rp. 10.669.542.801.846,20	31,15
Rata – Rata		5,89

Sumber : PPID Kaltim (diolah : 2019)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar (15,62)%. Pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 2,15%. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah sebesar 31,15%,

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan atau ditargetkan. Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.4 Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)	Kinerja
2015	Rp. 5.095.145.980.601,16	Rp. 4.950.160.613.906,01	97,15	Cukup Efektif
2016	Rp. 3.921.364.868.076,59	Rp. 4.029.364.843.886,11	102,75	Sangat Efektif
2017	Rp. 4.167.589.517.079,35	Rp. 4.588.751.727.469,47	110,11	Sangat Efektif
2018	Rp. 5.129.056.874.576,00	Rp. 5.800.270.285.305,67	113,09	Sangat Efektif
Rata-Rata			105,78	Sangat Efektif

Sumber : PPID Kaltim (diolah : 2019)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar 97,15%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 5,6% menjadi 102,75%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 7,36% menjadi 110,11%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 2,98% menjadi 113,09%.

Analisis Varian Belanja

Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hasil perhitungan analisis varian belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Perhitungan Varian Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Presentase (%)
2015	Rp. 7.052.533.847.969,75	Rp. 6.388.107.684.363,00	Rp. 664.426.163.606,75	90,58

2016	Rp. 5.649.687.263.500,00	Rp. 5.293.741.507.697,40	Rp. 355.945.755.802,60	93,70
2017	Rp. 6.009.766.572.310,00	Rp. 5.446.410.626.566,14	Rp. 563.355.945.743,86	90,63
2018	Rp. 7.023.042.019.323,00	Rp. 6.248.052.604.351,99	Rp. 774.989.414.971,01	88,97

Sumber : PPID KALTIM (diolah : 2019)

Berdasarkan tabel 4.5 dilihat dari analisis varian belanja daerah, tahun 2015 pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dengan jumlah sebesar 90,58% dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2016 menggunakan dengan jumlah sebesar 93,70% dari jumlah yang dianggarkan, kemudian tahun 2017 menggunakan dengan jumlah sebesar 90,63% dari jumlah yang dianggarkan, dan pada tahun 2018 menggunakan dengan jumlah sebesar 88,97% dari jumlah yang dianggarkan.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui apakah pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ataukah penurunan. Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja :

Tabel 4.6 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja
2015	Rp. 6.388.107.684.363,00	
2016	Rp. 5.293.741.507.697,40	(17,13)
2017	Rp. 5.446.410.626.566,14	2,88
2018	Rp. 6.248.052.604.351,99	14,72
Rata-Rata		0,16

Sumber : PPID KALTIM (diolah : 2019)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat pertumbuhan belanja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar (17,13)%, pada tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 2,88%, dan pada tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 14,72%.

Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari analisis efisiensi belanja ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Berikut perhitungannya:

Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2015	Rp. 7.052.533.847.969,75	Rp. 6.388.107.684.363,00	90,58	Efisien
2016	Rp. 5.649.687.263.500,00	Rp. 5.293.741.507.697,40	93,70	Efisien
2017	Rp. 6.009.766.572.310,00	Rp. 5.446.410.626.566,14	90,63	Efisien
2018	Rp. 7.023.042.019.323,00	Rp. 6.248.052.604.351,99	88,97	Efisien
Rata-Rata Persentase Rasio Efisiensi			90,97	Efisien

Sumber : PPID KALTIM (diolah : 2019)

Berdasarkan tabel 4.8 tingkat efisiensi belanja selama 2015-2018 dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2015 dengan rata-rata sebesar 90,58%, pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 93,70%, kemudian pada tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 90,63%, dan pada tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 88,97%, dan jumlah rata-rata rasio efisiensi belanja dengan rata-rata sebesar 90,97%.

Pembahasan

Hasil analisis varian (selisih) pendapatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sampai 2018 mengalami pendapatan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 diketahui anggaran pendapatan terdapat selisih sebesar (Rp. 1.032.704.747.529,98) yang bersaldo negatif, tahun 2016 terdapat selisih yakni sebesar Rp.223.053.463.138,95 bersaldo positif, tahun 2017 terdapat selisih sebesar (Rp. 65.627.124.563,02) yang bersaldo negatif, tahun 2018 terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 1.078.307.617.328,08 bersaldo positif.

Hasil analisis pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (15,62)%. Kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 2,15%. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 31,15%, dan jumlah rata-rata pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata sebesar 5,89%.

Hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar 97,15%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 5,6% menjadi 102,75%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 7,36% menjadi 110,11%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 2,98% menjadi 113,09%.

Hasil analisis varian belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2018 dapat dikatakan sangat baik karena adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Pada tahun 2015 pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dengan jumlah sebesar 90,58% dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2016 menggunakan dengan jumlah sebesar 93,70% dari jumlah yang dianggarkan, kemudian tahun 2017 menggunakan dengan jumlah sebesar 90,63% dari jumlah yang dianggarkan, dan pada tahun 2018 menggunakan dengan jumlah sebesar 88,97% dari jumlah yang dianggarkan.

Hasil analisis pertumbuhan belanja daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan jumlah rata-rata sebesar 0,16%. Dapat dilihat pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 17,13%, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,88%, dan kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,72%.

Hasil analisis rasio efisiensi belanja terlihat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan efisiensi belanja yang terbukti rasio efisiensi pada tahun 2015 sebesar 90,58%, kemudian pada tahun 2016 sebesar 93,70%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 90,63%, dan pada tahun 2018 sebesar 88,97%. Hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan efisien karena dalam melaksanakan realisasi belanjanya tidak melebihi anggaran belanja.

E. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami pendapatan yang fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pendapatan yang positif yaitu 100,86%.
2. Pertumbuhan pendapatan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2015-2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif meningkat yaitu 5,89%.
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2018 dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata efektivitas yaitu 105,78%.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggunakan anggaran belanjanya pada tahun 2015-2018 memiliki kinerja yang baik dalam penghematan

- anggaran belanja. Hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berhasil dalam mengurangi porsi belanjanya dengan rata-rata belanja 90,97%.
5. Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja yang positif 0,16%
 6. Analisis rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2018 dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memanfaatkan penghematan anggaran dengan rata-rata efisiensi 90,97%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mencapai target untuk tahun 2015 dan 2017 yang ditentukan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan membuat pelayanan wajib pajak menggunakan teknologi digital terbaru supaya memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggunakan anggaran belanjanya pada tahun 2015-2018 telah melakukan penghematan anggaran. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya tetap mengontrol penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe, OS, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A dan Kusufi, S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim. A (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga. BPFE: Yogyakarta.
- Mamesha, Halim. (2013) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Pemedagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP No. 03 Tentang Laporan Arus Kas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP No. 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua)*.

Edisi pertama. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.